

AKTUALISASI PEMBELAJARAN *REAL LEARNING* DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Andriyana^{a*}, Muhammad Idris^b

^a Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta, Indonesia

^b Politeknik Pelayaran Sorong, Kota Sorong, Indonesia

*Corresponding author: Andriyana@polimedia.ac.id

Article History	
Received: 10 – 02 - 2022	Received in revised form: 08 – 04 - 2022
Accepted: 14 – 02 – 2022	Available online: 25 – 06 – 2022

Abstrak: Kualitas Pendidikan di suatu negara erat kaitannya dengan sistem kurikulum yang diterapkan, terutama mengenai metode pendidik dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan oleh pendidik sangat berpengaruh terhadap daya tangkap dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai tujuan utama menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Tentunya untuk menjalankan tujuan tersebut sangatlah sulit apabila tidak diterapkannya metode yang tepat, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ilmu mengenai kecakapan hidup mendasar untuk seorang warga negara. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengambilan data melalui studi pustaka. Dari hasil pembahasan yang dikemukakan, beberapa aspek penting manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diperlukan dalam memperkuat implementasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di satuan Pendidikan yakni: (1) kemampuan dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam perumusan tujuan, penentuan materi dan bahan ajar, model dan strategi pembelajaran, serta sistem penilaian. (2) kemampuan dalam mengorganisasi proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik pengorganisasian kelas, kegiatan pembelajaran, maupun sumber daya dan lingkungan bagi kepentingan belajar. (3) kemampuan mengaktualisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga terjadi proses *real learning* oleh siswa dalam proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. (4) kemampuan mengembangkan sistem evaluasi sebagai bagian dari proses untuk menilai sejauhmana telah terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku siswa.

Kata kunci: *Aktualisasi Pembelajaran, Real Learning, Kurikulum PKn.*

Abstract: *The quality of education in a country is closely related to the curriculum system that is applied, especially regarding the methods used by educators in the learning process. The method applied by educators greatly affects the comprehension and motivation of students in participating in learning, especially Civic Education learning which has the main goal of making students good and intelligent citizens. Of course, to carry out this goal is very difficult if the right method is not applied, because Citizenship Education is the science of basic life skills for a citizen. This study uses a qualitative research design with a descriptive method with data collection through literature study. From the results of the discussion presented, several important aspects of Civic Education learning management are needed in strengthening the implementation of the Citizenship Education curriculum in the Education unit, namely: (1) the ability to prepare Civic Education learning plans both in the formulation of objectives, determining teaching materials and subject, models and strategies learning, as well as the assessment system. (2) the ability to organize the learning process for Citizenship Education, both in organizing classes, learning activities, as well as*

resources and the environment for learning purposes. (3) the ability to actualize Citizenship Education learning so that a real learning process occurs by students in the process of forming values, attitudes, and behaviors. (4) the ability to develop an evaluation system as part of the process to assess the extent to which there has been a change in student attitudes and behavior.

Keywords: *Actualization of Learning, Real Learning, Civics Curriculum.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran wajib yang harus diajarkan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalamnya menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran atau mata kuliah wajib, sehingga di tiap jenjang pendidikan, mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan harus diberikan kepada peserta didik. Di sisi lain, Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki beban moral untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keberagaman di Indonesia juga memiliki fungsi untuk membangun karakter bangsa. Karakter menjadi tujuan utama pendidikan nasional agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizenship*). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini menggunakan metode pembelajaran yang konvensional untuk membangun karakter peserta didik, sehingga seiring berkembangnya zaman, pembelajaran tersebut harus diinovasi agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka pembelajaran akan monoton dan membosankan serta capaian kurikulum yang diharapkan tidak sampai kepada peserta didik. Di sisi lain, seiring perkembangan zaman dan peradaban, Pendidikan Kewarganegaraan juga harus mampu mempertahankan fungsi dan perannya dalam rangka menyambut era globalisasi yang dituntut untuk membangun kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia khususnya karakter bangsa. Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang mengakses dunia maya seperti dunia nyata. Teknologi era sekarang berbasis *artificial intelligence* dan internet untuk mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Revolusi industri 4.0 dengan era *society 5.0* memiliki perbedaan di dalam penggunaan teknologi, revolusi industri 4.0 lebih menekankan pada bidang bisnis, sedangkan era *society 5.0* tidak hanya menekankan pada bidang bisnis saja, namun juga setiap kebutuhan manusia di berbagai bidang yang menghilangkan kesenjangan sosial, bahasa, usia, dan jenis kelamin (Ely Nastiti dan Abdu, 2020). Dunia pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era *society 5.0* harus mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan termasuk pembangunan karakter yang berdasarkan Pancasila kepada peserta didik yang hingga saat ini semakin memudar, mengingat era *society 5.0* sangat memengaruhi karakter generasi penerus bangsa. Peserta didik di era *society 5.0* harus mampu menguasai beberapa kompetensi, yaitu *leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan team work* (Ely Nastiti dan Abdu, 2020). Pendidikan di Indonesia harus mampu membangun

kompetensi-kompetensi tersebut, sehingga Indonesia di dalam menghadapi era *society* 5.0 tidak mengalami kendala sehingga dapat membangun karakter peserta didik dan masa depan Indonesia lebih cerah. Mengacu kepada pendapat Sagala (2009, Hlm. 21) Tenaga Pendidik, merupakan seseorang yang memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik. Oleh karena itulah, pendidik merupakan seseorang yang bijaksana serta berwibawa dalam berperilaku. Pendidik haruslah yakin akan proses pembelajaran untuk mencerdaskan peserta didiknya. Selain itu menurut Sagala (2009), pendidikan adalah suatu proses pola kehidupan untuk membuat seseorang menjadi lebih baik lagi melalui dua sistem yakni sistem mekanik dan sistem organik. Sistem mekanik adalah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan *input-process-output* yang terdapat hubungan kausal bersifat langsung dan linier. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi *output* dapat didesain dengan memanipulasi *input*. Sebagaimana diketahui *input* dalam proses pendidikan mencakup siswa, guru, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, ruang kelas dan pergedungan, peralatan, dan kondisi lingkungan. Artinya, upaya untuk meningkatkan mutu *output* dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi kualitas *input*.

Menyadari masih rendahnya kualitas pendidik yang ada, beberapa tahun terakhir Pemerintah mulai menggalakkan program sertifikasi dan uji kompetensi pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen” dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang “Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru” menyebutkan bahwa seorang pendidik/guru dituntut memiliki empat (4) kompetensi: yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tujuan program sertifikasi dan uji kompetensi pendidik ini adalah untuk menguji kompetensi para guru-guru yang mengajar di sekolah sehingga nantinya bisa disebut guru profesional. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran memperlihatkan kepada kita bukan hanya persoalan kompetensi guru yang masih rendah, tetapi juga rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru masih kurang mampu mengatur manajemen pembelajaran yang melibatkan siswa, kurikulum, materi pembelajaran, ruang kelas, lingkungan sekolah, dll. dengan baik.

Keterkaitan antara 4 kompetensi ini memacu guru untuk dapat menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik sehingga mampu mengelola pembelajaran peserta didik dengan baik. Namun ironisnya banyak guru yang masih belum mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Proses dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis oleh pendidik dan peserta didik, pemerintah, dan masyarakat luas. Usaha itu berupa kegiatan dan proses yang terjadi dalam hubungan interaktif belajar mengajar antara guru dan siswa yang difasilitasi oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat. (Sagala, 2010, Hlm. 21).

Pendidik dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tak bisa kita pungkiri juga merupakan bagian tak terpisahkan dari permasalahan yang ada. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak pendidik yang mengajar pembelajaran PKn di satuan pendidikan belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Masih banyak pendidik PKn yang belum paham betul bagaimana cara mengajar dengan baik dan bagaimana manajemen pembelajaran *real learning* PKn yang baik. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang diharapkan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen” Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data dari UNESCO (2020), tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 204 Negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (2016), ke-99 (2017), ke-105 (2018), dan ke-109 (2019). Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 Negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh *The World Economic Forum* (2020), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 Negara yang disurvei di dunia, lalu dalam survei kualitas pendidikan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA), Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 Negara. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurikulum pendidikan, sistem pembelajaran yang masih konvensional dan kaku serta rendahnya inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik.

Masih banyaknya hambatan serta tantangan yang harus dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang selalu berusaha untuk membangun karakter peserta didik, sehingga tidak dipungkiri seluruh pendidik Pendidikan Kewarganegaraan selalu memikirkan strategi untuk membangun karakter peserta didik

melalui proses pembelajaran. Winarno (2019) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan pada dasarnya untuk membekali peserta didik agar memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme dan menjadikannya dasar dalam bersikap dan bertindak dengan keahlian dan profesi yang kelak akan dijalankannya. Karakter nasionalisme dan semangat kebangsaan menjadi pembangunan utama Pendidikan Kewarganegaraan di satuan pendidikan, sehingga melalui proses tersebut bangsa Indonesia memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan yang lebih cerah dan juga lebih siap dalam menghadapi era globalisasi.

Pendidik merupakan komponen penting di dalam proses memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, entah seorang guru maupun dosen. Tergerusnya karakter dan moral peserta didik di era globalisasi menjadi tantangan bagi seorang pendidik. Pendidik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, karena berkaitan dengan moral dan karakter peserta didik. Membangun karakter peserta didik merupakan tanggung jawab dan tugas utama seorang pendidik khususnya pendidik Pendidikan Kewarganegaraan. Implikasi di era globalisasi ternyata dapat memengaruhi karakter peserta didik, apabila karakter peserta didik mulai tergerus yang jauh dari nilai-nilai Pancasila secara otomatis akan memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Widiatmaka (2016) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pendidik sebagai seseorang yang profesional yang mampu atau mengajar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan harus ikut serta bertanggung jawab, apabila kualitas pendidikan menurun khususnya di negara Indonesia, mengingat pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang sangat penting khususnya untuk memperbaiki karakter pemuda sebagai generasi penerus bangsa agar masa depan bangsa lebih cerah. Pendidik Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan seorang pendidik yang memiliki pengaruh besar di dalam proses pembelajaran guna untuk memperbaiki kualitas karakter peserta didik, selain itu juga memiliki posisi penting di dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Di sisi lain, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi pendidik dalam menentukan strategi untuk membangun karakter peserta didik dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi era *society 5.0*. Pada era *society 5.0* seorang pendidik harus mampu menguasai kompetensi dasar sebagai seorang pendidik, agar di dalam menentukan metode pembelajaran dapat efektif dan efisien. Peran pendidik dalam membangun karakter bangsa sangatlah penting khususnya dalam menghadapi era *society 5.0* sehingga seorang pendidik harus mampu berfikir secara kreatif dan inovatif di dalam proses pembelajaran khususnya di dalam menentukan metode pembelajaran. Saepudin dan Jatnika (2019) Strategi yang harus dilakukan oleh seorang dosen dengan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan secara maksimal teknologi digital untuk hal-hal yang positif. Keberadaan internet bukan hanya sebatas sumber referensi dalam memahami materi pembelajaran, namun juga harus difungsikan untuk membentuk karakter tanggung jawab peserta didik dengan memberikan informasi kepada pengguna media

sosial yang benar, dan tidak menyebarkan informasi bohong (*hoax*). Seorang pendidik juga harus mampu mendidik mahasiswa agar pandai dan selektif dalam membaca berita atau mampu menganalisis berita yang diperoleh dengan arif dan bijaksana, apakah berita tersebut benar atau tidak. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik salah satunya, apabila seorang pendidik mampu memilih dan mengimplementasikan metode pembelajaran secara aktual atas dasar dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta memahami psikologi peserta didik, entah itu menggunakan metode ceramah, diskusi, *problem solving* dan lain sebagainya. Pemilihan metode pembelajaran di dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Hal tersebut harus dilakukan oleh seorang pendidik agar peserta didik tidak bosan di dalam mengikuti proses pembelajaran. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa peserta didik sangat mudah bosan dengan proses pembelajaran yang monoton tanpa memodifikasi metode pembelajaran, namun setiap pertemuan apabila metode pembelajaran bervariasi atau dimodifikasi dengan metode yang lainnya, peserta didik lebih semangat dan lebih fokus di dalam mengikuti proses pembelajaran. Kedisiplinan peserta didik di dalam memulai pembelajaran sangatlah penting khususnya di dalam membangun karakter kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik, selain itu apabila di dalam hati seorang pendidik benar-benar serius atau bersungguh-sungguh mengajar, secara psikologis peserta didik juga akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pendidik di dalam proses pembelajaran khususnya dalam hal membangun karakter peserta didik sangatlah penting, khususnya di dalam menghadapi era *society* 5.0. Suri tauladan seorang pendidik sangatlah dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, selain itu pendidik diwajibkan tidak hanya bisa mengajar saja, melainkan juga harus pandai mendidik dan menginspirasi peserta didik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode penelitian secara deskriptif, dengan proses pengambilan data yang digunakan studi pustaka atau studi literatur yaitu penulis mengumpulkan informasi-informasi dari sumber buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta jurnal baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional yang sudah di *publish* ke dalam jurnal ilmiah, kemudian dijadikan satu dalam jurnal ini. Dalam proses pengambilan data tersebut, penelitian di sini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan metode studi pustaka atau dokumen (jurnal *online*, prosiding *online*, buku, media berita cetak maupun *online* dan sebagainya), setelah data semua terkumpul kemudian peneliti melakukan analisis dengan teknik analisis data interaktif. Sugiyanto (2011) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk mencari yang diperoleh dari pengumpulan data (wawancara, catatan lapangan atau observasi, studi kepustakaan dan lain sebagainya), sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada pembaca. Di sisi lain, Miles dan Huberman (1992) menjelaskan bahwa analisis data interaktif memiliki beberapa tahap atau proses yang harus dilalui agar hasil penelitian dapat mudah

ditarik suatu kesimpulan, yaitu : a) Pengumpulan data, b) Reduksi data, c) Penyajian data, dan d) Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktualisasi Pembelajaran

Aktualisasi sebagaimana didefinisikan oleh Parker Follet (Daft dan Steers, 1986, dalam Sagala, 2010, Hlm. 49) sebagai “*the art of getting things done through people*” atau diartikan lebih luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan material secara efisien. Sejalan dengan definisi tersebut menurut (Buford dan Bedeian, 1988) Aktualisasi adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Definisi lain mengenai aktualisasi yang merupakan istilah lain dari penerapan pengelolaan yang menurut Suharsimi Arikunto (1996, Hlm. 2) adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan (dalam Sutikno, 2012, Hlm. 4).

Selain itu menurut (Sagala, 2010, Hlm. 53) Aktualisasi yang baik akan menentukan baik dan buruknya pembelajaran, bagaimana seorang pendidik menggunakan metode yang tepat, penyediaan alat belajar yang cukup, dan suasana kelas yang kondusif saat proses belajar mengajar. Itu semua sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Sutikno, 2012:6). Karena itu prinsip-prinsip aktualisasi pembelajaran yang dapat dipegang adalah memperoleh hasil yang paling efektif melalui orang-orang yang profesional mengacu pada visi dan misi satuan pendidikan dengan jalan melakukan proses aktualisasi, yakni menjalankan fungsi pokok program satuan sekolah yang ditampilkan oleh seorang pimpinan satuan pendidikan sebagai penanggung jawab institusi satuan pendidikan, pendidik sebagai penanggung jawab pelayanan belajar pada peserta didik dan tenaga kependidikan sebagai penanggung jawab teknis kependidikan di satuan pendidikan yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*) program kegiatan satuan pendidikan, pengorganisasian (*organizing*) tugas-tugas pokok satuan pendidikan, penggerakan (*actuating*) seluruh sistem satuan pendidikan, dan pengawasan (*controlling*) kinerja satuan pendidikan (Sagala, 2010, Hlm. 55).

Sementara itu, menurut Komalasari (2011, Hlm. 3), pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pendapat Komalasari, menurut Komara (2014, Hlm. 35) dalam pendekatan sistem, pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena satu

sama lain saling mendukung. Komponen-komponen tersebut dapat menunjang kualitas pembelajaran.

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya terdiri dari: (1) Peserta didik; (2) Pendidik; (3) Capaian; (4) Bahan Ajar; (5) Metode, (6) Media Pembelajaran; (7) Assesmen; (8) Masyarakat. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri, namun dalam berproses dikesatuan sistem mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. (Soetopo, 2005, Hlm. 143 dalam Komara, 2014, Hlm. 35). Kedelapan komponen tersebut tidak satupun yang dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Misalnya mengajar tidak dapat dilakukan di ruangan yang tidak jelas, tanpa siswa, tanpa tujuan, tanpa bahan ajar (Komara, 2014, Hlm. 35). Lebih lanjut menurut Komara (2014, Hlm. 37), sebagaimana dikutip dari Arikunto (1990, Hlm. 216), berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen-komponen yang dapat mendukung kualitas pembelajaran, maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang secara langsung berkaitan dengan berlangsungnya proses belajar tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu: Pendidik, Peserta Didik, Kurikulum, Capaian, Metode, dan Media.

Dalam sistem pendidikan nasional, capaian pembelajaran secara jelas tertuang dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni

“Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Capaian tujuan pendidikan nasional tersebut secara praktik dikembangkan melalui proses pendidikan yang secara kurikuler yang mempersyaratkan dikembangkannya proses belajar, pembelajaran, dan penilaian yang mendukung terwujudkannya capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara instrumental-managerial, keterwujudan semua unsur proses pendidikan tersebut memerlukan dukungan yang koheren dari unsur-unsur kepemimpinan, manajemen, dan budaya pendidikan, seperti digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.
Keterkaitan Proses Pembelajaran dalam Sistem Pendidikan Nasional



(Olahan Winataputra, 2013)

Kompetensi Pedagogik dan Implementasi Kurikulum PKn

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen” dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang “Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru” menyebutkan bahwa seorang guru dituntut memiliki empat (4) kompetensi, yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. *Kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. *Kompetensi kepribadian* adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. *Kompetensi profesional* adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan *Kompetensi Sosial* adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pendidik yang profesional adalah pendidik yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Keterampilan pendidik dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil (Saud, 2009, Hlm. 75).

Sementara itu secara lebih rinci dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang “Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru” disebutkan bahwa Kompetensi Pendidik mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut :

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Implementasi Kurikulum PKn

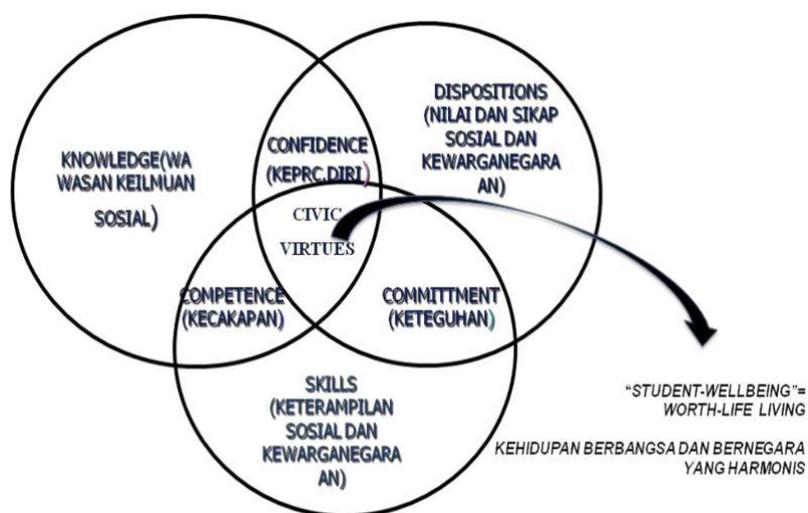
Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan matakuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi

bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Sementara itu, menurut Budimansyah dan Suryadi (2008, Hlm. 68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Gambar 2.
Konsepsi Holistik-Integratif Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan



(Olahan Winataputra, 2001, 2006, 2015, dari konsepsi CCE, 1986)

Aktualisasi *Real Learning* Pembelajaran PKn

Dalam bagian sebelumnya kita telah melihat fungsi-fungsi aktualisasi, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/aktualisasi

(*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam proses pembelajaran *Real Learning* PKn di Satuan Pendidikan, Pendidik perlu menerapkan fungsi-fungsi aktualisasi ini. Pertanyaannya bagaimana cara Pendidik PKn menerapkannya dalam proses pembelajaran?. Berikut ini bagaimana Pendidik PKn menerapkan aktualisasi pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi pedagogiknya :

Perencanaan (*Planning*)

Dalam bagian perencanaan ini, yang pertama-tama perlu dilakukan oleh pendidik PKn adalah merencanakan pengembangan perangkat pembelajaran, terutama pembuatan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Komalasari (2011, Hlm. 180), silabus adalah rencana pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu dan Sumber Belajar. Lebih lanjut menurut Komalasari (2011, Hlm. 180), terdapat beberapa fungsi silabus yang terpenting, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, sehingga memudahkan guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam tataran perencanaan dan implementasi pembelajaran di sekolah. Acuan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari silabus yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Di dalam RPP tercermin kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam pengertian lain rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) Kompetensi Dasar yang terdiri dari 1 (satu) Indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih (Komalasari, 2011, Hlm. 193-194).

Pengorganisasian (*organizing*)

Pemilihan metode pembelajaran/mengajar adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pendidik PKn setelah ia merencanakan dan membuat silabus dan RPP. Metode mengajar merupakan cara atau teknik penyampaian materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh pendidik. Metode mengajar ditetapkan berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran, serta karakteristik anak. Agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik, maka dalam proses belajar-mengajar digunakan alat pembelajaran. Alat pembelajaran dapat berupa benda-benda yang sesungguhnya, imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi dan sebagainya yang dituangkan dalam media. Media itu dapat

berupa alat elektronik, alat cetak, dan tiruan. Menggunakan sarana atau alat pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, anak, materi dan metode pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai serta diperlukan tenaga pengajar yang handal dan mempunyai kemampuan (*capability*) yang tinggi. (Komara, 2014, Hlm. 36).

Strategi pembelajaran yang dipilih oleh pendidik selanjutnya didasari pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang akan dihadapinya dalam menunjang pembelajaran *real learning*. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari (a) rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, (b) analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan, dan (c) jenis materi pembelajaran yang akan dikomunikasikan. Ketiga elemen yang dimaksud, selanjutnya disesuaikan dengan media pembelajaran atau sumber belajar yang tersedia dan mungkin digunakan. (Uno dan Mohamad, 2013, Hlm. 4).

Penggerakan/aktualisasi (*actuating*)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pendidik PKn dalam manajemen pembelajaran adalah *actuating*. Aktualisasi dalam hal ini adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Tahap pembelajaran adalah urutan prosedur pembelajaran yang diupayakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Prosedur ini lazimnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyajian (inti), dan tahap penutup (Solihatin, 2012, Hlm. 13-14).

1). Pendahuluan

- a. Apersepsi tujuan pembelajaran
- b. Memberikan tema pembelajaran
- c. Memberikan studi kasus permasalahan dalam pembelajaran
- d. Memberikan rencana kegiatan yang akan dilakukan
- e. Memberikan *pre-test*

2). Penyajian (Inti Pembelajaran)

- a. Menjelaskan materi disertai studi kasus permasalahan
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk aktif berpartisipasi
- c. Memberi penegasan inti materi pembelajaran
- d. Mengorganisir pelaksanaan dalam RPP

3). Penutup

- a. Penyimpulan dan Evaluasi Pembelajaran
- b. Melaksanakan *post-test*
- c. Aktualisasi

Pengawasan (*controlling*)

Bagian *controlling* dalam pembelajaran PKn berkaitan dengan penilaian hasil belajar siswa dan evaluasi atau penilaian terhadap seluruh program pendidikan. Istilah penilaian (*assessment*) dalam pendidikan merupakan proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik. Keputusan penilaian seperti lulus atau tidak lulus, telah mencapai standar penguasaan minimal kompetensi atau belum, dinyatakan dalam bentuk yang bersifat kualitatif, seperti baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Sebagai keputusan (*judgement*) dalam penilaian harus didukung oleh bukti-bukti sebagai data yang cukup yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui tahap pengukuran. (Komalasari, 2011, Hlm. 146).

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa aspek penting aktualisasi pembelajaran PKn yang diperlukan dalam memperkuat implementasi kurikulum PKn di satuan pendidikan. Aspek-aspek tersebut mencakup:

1. Kemampuan dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran PKn baik dalam penentuan tujuan, penentuan materi dan bahan ajar, model dan strategi pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta sistem assesmen.
2. Kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran PKn baik pengelolaan kelas, kegiatan pembelajaran, maupun media dan sarana-prasarana yang dibutuhkan bagi kepentingan belajar.
3. Kemampuan mengaktualisasi pembelajaran PKn sehingga terjadi proses *real learning* oleh peserta didik dalam proses penguatan nilai, sikap, karakter dan perilaku.
4. Kemampuan menginovasi sistem assesmen sebagai bagian dari proses untuk mengevaluasi sejauhmana telah terjadinya perubahan dalam sikap dan karakter peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi dan Damaitu, Emanuel Raja. (2021). *Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas*. Pancasila: Jurnal Ke-Indonesia-an, volume 01, nomor 01, April 2021. pp. 34-44.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, UPI.
- Ely Nastity, Faulinda dan Abdu, Aghni Rizqi Ni'mal. (2020). *Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0*. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, volume 5, nomor 1. April 2020. pp. 61-66.
- Komalasari, Kokom. (2011). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Komara, Endang. (2014). *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*. Bandung: Refika Aditama.

- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Penerjemah Tjeep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muchlas, Samani dan Hariyanto. (2012). *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Rema Rosdakarya.
- Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Octavia, Eva dan Rabe'I, M. Anwar. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Untuk Membentuk Mahasiswa Prodi PPKn Menjadi Warga Negara yang Baik dan Cerdas*. Sosio Horizon : Jurnal Pendidikan Sosial, volume 4, nomor 1. Juni 2017. pp. 111-124.
- Rahman, Ali. (2016). *Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)*. Jurnal Studi Pendidikan, volume XIV, nomor 1. Juni 2016. pp. 18-35.
- Saepudin, Epin dan Jatnika, Asep Wawan. (2019). *Kampanye Kewarganegaraan Sebagai Strategi Menuju Kebermaknaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital*. Seminar Nasional Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia. PPKn FIS, Universitas Negeri Medan. pp 63- 71.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, Syaiful. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiharti, Rahma. (2021). *Milenial Rawan Terjerumus Radikalisme*. 06 April 2021: <https://m.mediaindoneisa.com>.
- Sugiyanto. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sapriya. (2012). *Perlunya Reorientasi Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa, dalam transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI.
- Saptono. (2012). *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi dan Langkah Praktis*. Jakarta: Erlangga.
- Saud, Udin Syaefudin. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Solihatini, Etin. (2012). *Strategi Pembelajaran PPKn*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutikno, M. Sobry. (2012). *Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islam)*. Lombok: Holistica.

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta
- Uno dan Mohamad. (2013). *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiatmaka, pipit. (2016). “Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Peserta didik di dalam Proses Pembelajaran”. *Jurnal Civic*, volume 13, nomor 2, Desember 2016. pp. 188-198.
- Winarno. (2019). “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”. Jakarta: Bumi Aksa.
- Winataputra, U.S. (1990) *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah: Suatu Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____(2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi*, Bandung: Program Pascasarjana UPI (Disertasi).
- _____(2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Bandung.
- _____(2015). *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Historis-Epistemologis*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Yulaelawati, Ella. (2004). *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pakar Raya.